

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke IV memuat sejumlah tujuan Negara yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia, yaitu “membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*) yang berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sebagai Negara hukum, segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warganegara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga Negara-nya serta memberi dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/warga Negara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perlindungan hak-hak tersebut di dalam KUHP diwujudkan dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran.

Di dalam buku kedua yang mengatur tentang kejahatan tercantum perlindungan terhadap martabat dan harta benda seseorang serta perlindungan terhadap nyawa seseorang. Perlindungan tersebut dipertegas dengan adanya sanksi pidana yang diancamkan kepada perbuatan pidana yang dilakukan.

Di dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis sanksi pidana sebagai berikut :

1. Pidana pokok :
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Denda
  - e. Pidana Tutupan (UU No. 20/1946)
2. Pidana Tambahan :
  - a. Pencabutan Beberapa Hak Yang Tertentu
  - b. Perampasan Beberapa Barang Yang Tertentu
  - c. Pengumuman Putusan Hakim

R. Sugandi<sup>1</sup> di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP menyatakan :

Yang dimaksudkan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis kepada orang yang melanggar undang - undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut filsafat ada beberapa macam antara lain :

---

<sup>1</sup> R. Sugandi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 12.

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus memberikan rasa takut, agar orang tidak melakukan kejahatan.
3. Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
4. Pendapat lain lagi mengatakan, bahwa dasar dari pada hukuman ialah mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama.

Hukuman ada dua macam yakni : hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi (pembebanan rangkap) lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Menurut Pasal 35 KUHP dalam beberapa hal yang ditentukan, selain dari satu hukuman pokok dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu hukuman tambahan. Hukuman tambahan hanya sebagai penambah hukuman pokok; jadi tidak dapat dijatuhkan sendiri.

Pada zaman dahulu, sebelum adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia ada beberapa macam hukuman seperti :

1. Dibakar hidup-hidup terikat pada suatu tonggak.
2. Dibunuh dengan menggunakan sebilah keris.
3. Dicap dengan logam yang dibakar.
4. Dipukul
5. Dipukul dengan rantai
6. Ditahan di dalam penjara
7. Bekerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum.

Tetapi hukuman-hukuman seperti itu, kini sudah tidak diperkenankan lagi, dan yang sah menurut putusan hakim adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati misalnya :

1. Makar membunuh kepala negara (Pasal 104)
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2)
3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 2)
4. Membunuh Kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 4)
5. Melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan 340)
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)
7. Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai, sehingga menyebabkan adanya orang mati (Pasal 444)

8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan pertahanan Negara (Pasal 124 bis)
9. Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129)
10. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2)

Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Muljatno,<sup>2</sup> kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang - undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dituntut untuk pidana karena perbuatannya.

Asas Legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana jerman (1775-1833). Menurut Muljatno<sup>3</sup>, perumusan asas legalitas oleh Von Feuerbach dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori *Von Psychologischen Zwang* yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancam. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu

<sup>2</sup> Moeljatno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 27.

dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut (mutlak). Sama halnya dengan teori pembalasan (retribution).

Berdasarkan teori "*von psychologischen zwang*" yang dikembangkan di atas, maka setiap pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pembunuhan berencana, dianggap sudah menyetujui ancaman yang terdapat dalam pasal tersebut untuk dijtuhkan kepadanya. Pasal 340 KUHP menentukan : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam ~~kerana~~ pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang pembunuhan berencana yang menghebohkan masyarakat Jogjakarta yang dilakukan oleh Hardani dan teman-temannya terhadap korban Ria Puspita Restanti pada bulan April 2013 yang lalu. Kasus ini diproses menjadi perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Sleman, dan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Sleman No. 257/Pid.sus/2013/PN.Slmn, terdakwa Hardani Alias Degleng bin Judikohari dijatuhi pidana seumur hidup.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa Hardani dalam

perkara tersebut, dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi ini adalah : untuk memperoleh data, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi pelaku pembunuhan berencana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya fonis pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana.

**E. Keaslian Penelitian**

Untuk membuktikan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA** adalah tulisan asli dari penulis maka penulis melampirkan tiga judul penulisan hukum/skripsi yang mirip dengan judul penulisan hukum/skripsi penulis sebagai berikut :

1. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Nama Penulis : NICKY MICHAEL MOSES KATAREN

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

b. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

c. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain :
  - a) Akibat terhadap kematian atau cacat fisik.
  - b) Akibat terhadap mental dan sosial.
  - c) Akibat terhadap sarana dan prasarana.
  - d) Akibat terhadap perekonomian.
  - e) Akibat terhadap hubungan internasional.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain :
  - a) Dari sisi non-yuridis, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).



b) Dari sisi yuridis pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 6

undang - undang No. 15 Tahun 2003 yaitu :

- 1) Unsur subyektif, yaitu setiap orang, dengan sengaja, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
- 2) Unsur obyektif yaitu, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional.

2. Judul : Pertimbangan Putusan Hakim Pada Pelaku Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid. B/2010/PN. Yk)

Nama Penulis : PASKALIS YOSEE JEMIUN

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Yogyakarta, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya?

2) Adakah hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta ditinjau dari UU. No. 23 Tahun 2004?

b. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri ditinjau dari Undang - undang No. 23 Tahun 2004.

c. Kesimpulan :

- 1) Pertimbangan putusan hakim akan mempertimbangkan dari keterangan-keterangan saksi terutama saksi korban. Keterangan dari saksi korban hingga sejauh nama kekerasan yang dilakukan oleh suaminya meliputi apakah kekerasan itu sudah sering terjadi atau seberapa berat kekerasan itu dilakukan seperti dengan menggunakan senjata tajam atau perlakuan itu memang pernah berkali-kali dengan memukul itu merupakan kekerasan fisik, untuk kekerasan psikisnya

apakah tedakwa sering memberikan tekanan atau mengancam atau memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Majelis hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga memenuhi syarat keadilan, dengan memperhatikan keadaan korban, pelaku dijatuhi sanksi agar jera. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan dimuka persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan, pembuktian tersebut apabila benar dan hakim yakin atas perkara tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun tersirat.

- 2) Hambatan yang ada, disamping belum banyak yang tau tentang adanya Undang - undang PKDRT. Masyarakat juga enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terlebih istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atas perlakuan suami, dalam pemeriksaan kurang terbuka sehingga menghambat dalam pembuktian.

3. Judul : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Nama Penulis : CHRIS MARY YUNITA

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

a. Rumusan Masalah :

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

b. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan secara berencana, apakah hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat di dalam 340 KUHP.

c. Kesimpulan :

Dalam memutus perkara pembunuhan berencana, hakim pengadilan Negeri Yogyakarta yang di nilai sudah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana bardasarka suatu pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan, hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara melakukan tindak pidana pembunuhan, dan unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan-

pertimbangan lain yakni sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat pada reaksi masyarakat atau social, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindak pembunuhan, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang meliputi :

- 1) Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berbeda dengan ketiga penulisan hukum/skripsi yang diuraikan di atas, penulisan hukum/skripsi penulis dikhususkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian hukum ini, memerlukan batasan konsep untuk memberi batas agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau tidak menyimpang mengenai konsep Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

1. Pertimbangan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata timbang yang berarti tidak berat sebelah ; sama berat. Jadi pertimbangan hakim adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan sebelum melakukan putusan

dalam peradilan agar didasarkan pada kenyataan yang terungkap dalam persidangan.

2. Pelaku pembunuhan menurut KUHP adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana pembunuhan.
3. Tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP adalah perbuatan melawan hukum menghilangkan nyawa orang lain secara sadar dan melalui perencanaan atau persiapan terlebih dahulu.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

##### **b. Sumber Data**

Data dalam penelitian hukum ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti :
  - a) UUD 1945
  - b) KUHP
  - c) KUHAP
  - d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan, artikel dalam majalah hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

c. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada di perpustakaan.
- 2) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana.

d. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antar Undang - undang. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MELALUI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn :

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Penjara (Tujuan Tentang Penjatuhan Sanksi Penjara, dan Efektifitas Sanksi Pidana Penjara), Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Proses Pembuktian Dalam perkara Pidana (Kriteria Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana, dan Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Penjara), Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Melalui Putusan Hakim Dalam Perkara No.257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn (Identitas Terdakwa Dalam Putusan Perkara No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Dari Kuasa Hukum Terdakwa, Putusan Perkara No. 257/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Analisis).



### BAB III PENUTUP :

Bab ini berisi tentang Kesimpulan tentang apa yang menjadi pokok kajian penulis dan Saran untuk dapat dijadikan gambaran ataupun pedoman bagi perkembangan hukum di Indonesia.

